



Geruduk Kepatihan, Kecewa Tak Ditemui HB X

**Pedagang TM 2
Tuntut Relokasi yang
Menyejahterakan**

JOGJA - Pedagang Teras Malioboro (TM) 2 kembali melakukan aksi ke Kantor Gubernur HB X di Kepatihan, kemarin (2/8). Pedagang merasa tidak pernah dilibatkan dalam proses relokasi dan terus menuntut relokasi yang menyejahterakan.

Massa aksi datang dengan membawa keranda bertuliskan "Kesejahteraan PKL Malioboro". "Itu simbol kesejahteraan PKL yang sudah mati," ujar Ketua Koperasi Tri Dharma Arif Usman di sela aksi.

Pihaknya kembali menyuarakan aspirasi yakni partisipasi dan relokasi yang menyejahterakan. Tuntutan dari awal hingga saat ini belum pernah diindahkan oleh pemerintah. "Kenyataannya di pemkot, terutama Disbud dan UPT Cagar Budaya adalah ruang tertutup dan tidak pernah melibatkan kami," tuturnya.

Tuntutan pada hari itu dilayangkan kepada Pemprov DIJ selaku pemangku kebijakan. Sebelumnya, aksi dilakukan beberapa kali di pemkot yang dalam hal ini sebagai pelaksanaan kebijakan. Namun tidak diindahkan. Ia mendapatkan informasi bahwa opsi lapak di tempat relokasi baru seluas 60x60 cm.

"Bagaimana kami menempati tempat yang kami tidak tahu. Padahal kami adalah pelaku di situ, kami bukan barang tapi orang yang akan menata usaha dan hidup di sana," ujarnya dengan heran.

Ia mengancam akan melakukan aksi lanjutan apabila tuntutan belum juga dipenuhi. Para pedagang merasa selama dua tahun di TM 2 tidak pernah diperhatikan oleh pemerintah. Evaluasi juga tidak pernah dilibatkan. "Kemarin ada info dari anggota, (dia) untuk bisa menyambung hidup sampai jual tanah," jelasnya.

Sementara itu, Sekprov DIJ Beny Suharsono mengatakan aksi itu adalah bentuk komunikasi. Nanti-



TAK BISA MASUK: Pedagang Teras Malioboro 2 melakukan aksi unjuk rasa dengan dibatasi pagar Kantor Kepatihan, Kota Jogja, kemarin (2/8). Mereka protes karena merasa tidak dilibatkan dalam proses relokasi dan menuntut relokasi yang menyejahterakan.

nya akan dicatat dengan baik. Menurutnya, setiap perubahan atau pengeseran pasti terdapat dinamika di dalamnya. "Rencananya karsa siap di 2024 ini. Jadi harus dialog

dari awal, tentu ada yang tidak puas," ujarnya.

Ia menyampaikan kewenangan TM 2 berada di wilayah Pemkot Jogja. Namun koordinasi tetap dilakuk

dengan Pemprov DIJ. "Kan ada pengelola masing-masing. Sudah ada. (Satu per satu) dikawal sampai selesai, jangan dipilah-pilah ke mana-mana," jelasnya. **(oso/laz/zi)**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 02 Oktober 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005